

**PENGURANGAN RISIKO BENCANA LONGSOR MELALUI PROGRAM
DESA TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Zulfikar Ramadhani NPP. 30.0736

*Asdaf Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah Program Studi Manajemen
Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: ramadhanidadan17@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Muslim, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In this study the authors focused on how the Regional Disaster Management Agency of Semarang Regency implemented landslide disaster risk reduction through a disaster resilient village program whose implementation had not been optimal. **Objectives:** To determine the risk reduction of landslides through the disaster resilient village program by the Regional Disaster Management Agency in Semarang Regency, Central Java Province, the Inhibiting Factors of the Semarang Regency Regional Disaster Management Agency in implementing the program, and the Efforts of the Semarang Regency Regional Disaster Management Agency in facing implementation obstacles Tangguh village program. **Methodology:** This study uses a qualitative descriptive approach and inductive data analysis through access to data obtained from interviews, observation, and documentation. **Results/Findings:** The findings from this study are that the implementation of landslide disaster risk reduction through the disaster resilient village program is good but encounters obstacles due to lack of budget and personnel in its implementation. So efforts were made to propose additional budgets and personnel by mapping budget and personnel requirements first. **Conclusion:** The implementation of landslide disaster risk reduction through the Tangguh Disaster Village program has been good so that the community is satisfied with the performance carried out by the Semarang Regency Regional Disaster Management Agency even though it encounters several obstacles. With these obstacles continue to be made efforts to reduce existing barriers.

Keywords : Landslide, Disaster Risk Reduction, Semarang Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam penelitian ini penulis berfokus terhadap bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang melaksanakan pengurangan risiko bencana longsor melalui program desa tangguh bencana yang pelaksanaannya belum optimal. **Tujuan:** Untuk mengetahui pengurangan risiko bencana longsor melalui program desa tangguh bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Faktor Faktor Penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan program, dan Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam menghadapi hambatan pelaksanaan program desa Tangguh . **Metodologi:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis data secara induktif melalui akses data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pengurangan risiko bencana longsor melalui program desa tangguh bencana sudah baik namun menemui hambatan kekurangan anggaran dan personil dalam pelaksanaannya. Sehingga dilakukan upaya pengusulan penambahan anggaran dan juga personil dengan pemetaan kebutuhan anggaran dan personil terlebih dahulu. **Kesimpulan:** Pelaksanaan pengurangan risiko bencana longsor melalui program desa Tangguh bencana sudah baik sehingga masyarakat menemui kepuasan atas kinerja yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang meskipun menemui beberapa hambatan. Dengan hambatan tersebut terus dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi hambatan yang ada.

Kata kunci : Longsor, Pengurangan Risiko Bencana, Kabupaten Semarang



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berada di benua Asia Tenggara dihimpit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia memiliki banyak keindahan alam yang mampu memanjakan mata. Termasuk dalam negara beriklim tropis, Indonesia memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sehingga flora dan fauna yang terdapat di negara ini begitu banyak dan bermacam – macam. Namun, dibalik keindahannya itu negara beriklim tropis adalah negara yang memiliki curah hujan dan kelembapan yang cukup tinggi. Banyak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UUD 1945 mencantumkan tujuan – tujuan negara yang salah satunya berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia” dalam hal ini pemerintah Indonesia telah memiliki upaya dalam perlindungan terhadap seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tercipta rasa aman dan nyaman pada kehidupan di dalam bermasyarakat dan bernegara Tetapi masyarakat Indonesia kebanyakan belum menyadari pentingnya mengelola bencana dengan efisien karena terjadinya suatu bencana tidak dapat diprediksi. Dalam hal ini risiko yang berdampak pada masyarakat yaitu kekurangan informasi mengenai tahapan penyuluhan dan pencegahan bencana. Menurut Rinaldi (2009) ”kesiapsiagaan masyarakat Indonesia masih minim dalam menghadapi bencana, hal ini dibuktikan dari banyaknya korban saat terjadi bencana”

Upaya pemerintah untuk menegaskan pentingnya upaya mitigasi bencana adalah dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada skala nasional dilanjutkan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada skala daerah. BNPB merupakan perumus konsep penanggulangan bencana nasional serta mitigasi yang berada di pusat dan BPBD berupaya dalam menanggulangi bencana di tingkat daerah. Keduanya dibentuk guna memudahkan koordinasi dalam penanggulangan bencana. Pemerintah meninggalkan paradigma lama dengan membuat regulasi berupa UU yang mengatur tentang mitigasi dan persiapan menghadapi bencana agar meminimalisir kerugian akibat bencana yaitu Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang isinya: ”Bencana adalah suatu negara yang mengganggu dan mengancam dikehidupan masyarakat di karenakan ulah manusia atau kejadian alam dan atau non alam yang berdampak pada kerugian lingkungan, adanya korban jiwa, berdampak pada psikologis dan tentunya harta benda”. Yang di maksud dari penanggulangan bencana yaitu cara untuk mengurangi dampak dari sebuah bencana, dan langkah yang di lakukan adalah rehabilitasi, pencegahan bencana serta adanya tanggap darurat.

Tanah Longsor adalah bencana alam yang kejadiannya diakibatkan oleh gerakan massa permukaan tanah ataupun batuan dan air juga percampuran antara keduanya yang kemudian menuruni lereng dikarenakan terganggunya kestabilan tanah di lereng tersebut. Tanah longsor dapat diakibatkan oleh kondisi alam dan geografis yang tidak di rawat dengan manajemen perawatan dan penjagaan yang baik. Tanah longsor merupakan bencana yang tidak asing terjadi di Jawa Tengah karena kondisi geografisnya yang kebanyakan berupa pegunungan dan juga karena kepadatan

penduduknya yang tinggi tidak hanya di perkotaan namun juga berada pada dataran tingginya. Hal itu menjadikan adanya potensi bencana tanah longsor di Jawa Tengah. Kabupaten Semarang adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang berpotensi terjadi bencana tanah longsor karena memiliki kontur geografis berupa pegunungan menjadikan daerah tersebut memiliki potensi terjadi bencana tanah longsor menjadi cukup tinggi. Kontur tanah yang tidak stabil juga menjadikan Kabupaten Semarang menjadi rawan terhadap pergerakan tanah apalagi disaat musim penghujan. Bencana longsor ini mengakibatkan banyak kerugian timbul, kerugian ini terus terjadi dikarenakan masyarakat bersifat reaktif pada bencana. Dan juga mitigasi bencana yang kurang dikalangan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengurangan resiko bencana sangatlah dibutuhkan.

Program Desa Tangguh Bencana adalah salah satu program mitigasi atau sebagai langkah pengurangan resiko bencana yang dibentuk oleh BNPB melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mengenali potensi bencana, mengurangi potensi bencana dan mampu mengorganisasikan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana yang masih minim di Kabupaten Semarang menjadikan potensi potensi bencana longsor yang ada dalam taraf yang tetap. Berdasarkan hal tersebut, laporan tentang pelaksanaan mitigasi dan pengurangan resiko bencana yang masih minim dilakukan oleh BPBD Kabupaten Semarang serta perlunya kajian yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan mitigasi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana longsor melalui program desa tangguh bencana yaitu program ini belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat secara luas. Padahal pelaksanaan program desa tangguh bencana memiliki objek langsung terhadap peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko atau dampak dari suatu kejadian bencana. Kurangnya pengetahuan akan program desa Tangguh bencana ini membuat masyarakat yang hidup dalam resiko tinggi terdampak bencana menjadi acuh dan tidak mengetahui apabila dirinya beresiko terdampak bencana dan tidak melakukan suatu upaya untuk mengurangi dampak tersebut. Memang tidak langsung terasa dampak yang ada, namun apabila terjadi suatu bencana resiko dan dampak tersebut akan sangat terasa bagi masyarakat. Resiko dan dampak ini muncul dari banyak faktor, seperti faktor alam yang berupa kondisi geografis Kabupaten Semarang yang berupa pegunungan dengan lereng-lereng yang curam. Dan Adapun faktor manusia yaitu masyarakat yang tetap memilih bermukim pada lereng-lereng yang curam tersebut dengan alasan mata pencaharian dan juga tanah warisan leluhur yang harus dijaga kepemilikannya. Ditambah lagi kondisi iklim Indonesia yang terjadi hujan sepanjang tahun menambah resiko dan dampak terjadinya bencana

pada daerah dengan kondisi wilayah tersebut. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengurangan risiko bencana longsor melalui program desa tangguh bencana yang baik dan optimal diperlukan pemetaan mulai dari anggaran, skala prioritas, waktu pelaksanaan, dan banyak hal lagi dengan baik dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan program desa tangguh bencana juga harus diikuti dengan niat dan minat baik dari BPBD ataupun masyarakat agar program ini dapat berjalan dan berkelanjutan. Maka dari itu yang pertama dibangun adalah pengetahuan dan rasa peduli masyarakat terhadap risiko bencana dan dampak bencana yang ada disekitar mereka. Sehingga mereka terpicu untuk melaksanakan upaya pengurangan dan melakukan antisipasi-antisipasi untuk mengurangi dampak dari terjadinya bencana di wilayah mereka tinggal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Manfaat menggunakan penelitian sebelumnya adalah menyediakan kerangka kerja untuk penelitian dan perbandingan, selain itu juga dapat membantu dalam mengetahui persamaan dan perbedaan signifikan yang dibuat oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini terinspirasi dengan beberapa penelitian sebelumnya dalam rangka pengurangan risiko bencana dan program desa tangguh bencana.. Pertama oleh Novian Anadri Akhirianto pada 2017 *Konsep Desain Pengurangan Risiko Bencana Longsor Berbasis Komunitas*. Hasil dari penelitian tersebut adalah mengemukakan kebijakan pemerintah terhadap regulasi pengurangan risiko bencana di Indonesia dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas masyarakat serta upaya-upaya pengenalan bencana kepada masyarakat. Penelitian kedua, *Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Melalui Pendidikan Formal* oleh Aldila Rahma tahun 2018. Penelitian tersebut mendapatkan hasil mengetahui peran sekolah terhadap kebencanaan lalu pengenalan segala sesuatu tentang kebencanaan dan bagaimana cara menghadapinya melalui pembelajaran di sekolah dan membangun formulasi masyarakat yang sadar akan bencana dan langkah-langkah dalam mitigasi dan mengurangi dampak risiko dari bencana. Selanjutnya penelitian ketiga oleh Risma Tri Yunita tahun 2021 yang berjudul *Strategi Program Desa Tangguh Bencana Oleh BPBD Dalam Pengembangan Masyarakat di Desa Sukaraksa, Kecamatan Sigudeg, Bogor Jawa Barat*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui Desa Sukaraksa memahami strategi pelaksanaan program desa tangguh bencana dalam melakukan mitigasi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana. Hal ini didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana mulai dari pelaksana hingga masyarakat desa itu sendiri.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Adapun beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu selain untuk mengetahui bagaimana pelaksanaam pengurangan risiko bencana longsor melalui program desa tangguh bencana, pada penelitian ini penulis juga bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana serta mengetahui bagaimana upayanya dalam menghadapi faktor penghambat dalam pengurangan risiko bencana melalui program desa tangguh bencana tersebut. Selain itu pengukuran atau indikator yang

digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini penulis menggunakan pendapat dari Jonathan Lassa (2009) bahwasanya sebuah pendekatan yang mendorong komunitas untuk mengelola bencana di tingkat lokal. Upaya tersebut memerlukan interpretasi masyarakat dalam menganalisis segala risiko bencana yang ada di wilayahnya, menentukan prioritas penanganan, merencanakan kegiatan pengurangan risiko bencana sampai dengan mengevaluasi kinerjanya sendiri. Lassa juga menyebutkan risiko bencana adalah komposit atau gabungan dari aspek kerentanan, kapasitas, dan ancaman (hazard) selanjutnya yang diperlukan adalah pemetaan persepsi komunitas tentang risiko. Latihan ini dikenal dengan sebutan ranking risiko (risk ranking). Kerangka analisis seperti CVA (Capacity and Vulnerability Analysis) membagi kerentanan dalam tiga bagian, yakni: pertama, kerentanan secara material (uang kontan, tanah, alat, makanan, pekerjaan, akses ke kredit/pinjaman uang), kerentanan secara sosial kelembagaan (jaringan sosial, relasi kekeluargaan, lembaga kesejahteraan setempat dan nasional), dan kerentanan sikap/motivasi (rasa percaya diri, mengendalikan, kekuasaan, kemampuan). Sementara ancaman adalah potensi dari suatu peristiwa yang dapat memberikan kerugian dan gangguan terhadap manusia ataupun lingkungan. Kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu daerah serta masyarakat dalam melakukan tindakan pengurangan tingkat kerugian dan tingkat ancaman bencana yang berpotensi terjadi. Dalam upaya pengurangan risiko bencana, dengan teori tersebut penulis dapat mengetahui bagaimana BPBD Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan program desa Tangguh bencana. Faktor penghambat didapat dari hambatan yang ditemui BPBD Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan program dan upaya dalam mengurangi hambatan-hambatan tersebut.

1.5 Tujuan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang pertama, Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengurangan Resiko Bencana Melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Semarang. Kedua, untuk menganalisis faktor penghambat dalam melakukan Pengurangan Resiko Bencana Melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Semarang. Dan terakhir untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Semarang melalui BPBD dalam meningkatkan pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana.

II. METODE

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis data secara induktif melalui akses data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Definisi penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013) Metode penelitian kualitatif adalah langkah sebuah penelitian yang berprinsip pada filsafat postpositivisme, dipakai dalam hal meneliti pada situasi obyek yang alamiah, analisis data yang bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitas lebih membahas maknanya dari pada penymarataannya. Untuk memperoleh data secara aktual guna mendukung proses pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini, Sugiyono (2017:224) menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam melaksanakan

penelitian karena tujuan utama dari suatu penelitian yakni untuk mendapatkan data, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Sekretaris BPBD Kabupaten Semarang, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Semarang, Satgas Kebencanaan BPBD Kabupaten Semarang serta 1 (satu) orang warga. Selain itu dalam pengumpulan data dokumentasi penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, laporan hasil kerja BPBD, Arsip BPBD, serta gambar/ foto yang berkaitan dengan pelaksanaan program desa tangguh bencana. Penulis juga melakukan observasi terhadap kondisi beberapa wilayah rawan longsor di Kabupaten Semarang. Adapun beberapa cara analisis data dengan menggunakan 4 tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, penulis menganalisis pengurangan risiko bencana longsor melalui program desa tangguh bencana di Kabupaten Semarang menggunakan teori pengurangan risiko bencana Jonathan Lassa bahwasanya dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana memiliki tiga unsur yaitu pengurangan ancaman, penurunan kerentanan, dan peningkatan kapasitas.

3.1 Pengurangan Risiko Bencana Longsor Melalui Program Desa Tangguh Bencana Melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

a. Pengurangan Ancaman

Ancaman merupakan suatu potensi dari suatu peristiwa yang dapat memberikan kerugian dan gangguan terhadap manusia ataupun lingkungan. Kerugian dan gangguan tersebut merupakan potensi bencana yang ada disekitar kehidupan manusia. Ancaman dibagi menjadi dua indikator yaitu berupa potensi kerugian yang disebabkan oleh suatu kondisi dan juga gangguan-gangguan yang muncul dikalangan masyarakat umum. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis tentang pengurangan ancaman adalah bagaimana BPBD terus melakukan penyadaran terhadap masyarakat tentang risiko bencana di Kawasan mereka tinggal. Masyarakat juga melakukan upaya-upaya dalam hal mengurangi ancaman-ancaman kebencanaan seperti memberi tanggul beton pada lereng yang rawan terjadi longsor.

b. Penurunan Kerentanan

Kerentanan merupakan hasil dari kondisi dan proses yang dipengaruhi dari bahaya yang berasal dari alam, bencana teknologi, atau dari kondisi ekstrem tertentu. Kerentanan diukur dari kesiapan material, sosial/kelembagaan dan juga motivasi. Kerentanan material terjadi akibat ketidakpastian anggaran yang akan digunakan juga sarana prasarana yang dinilai kurang memadai. Kerentanan yang bersifat materi juga ditemukan oleh peneliti dalam observasi terhadap sarana dan prasarana dimana jumlah sarana dan prasarana yang terbatas jumlahnya dengan cakupan BPBD Kabupaten Semarang yang cukup luas. Dalam hal kelembagaan BPBD sudah mampu dan siap melakukan program desa tangguh bencana sesuai dengan

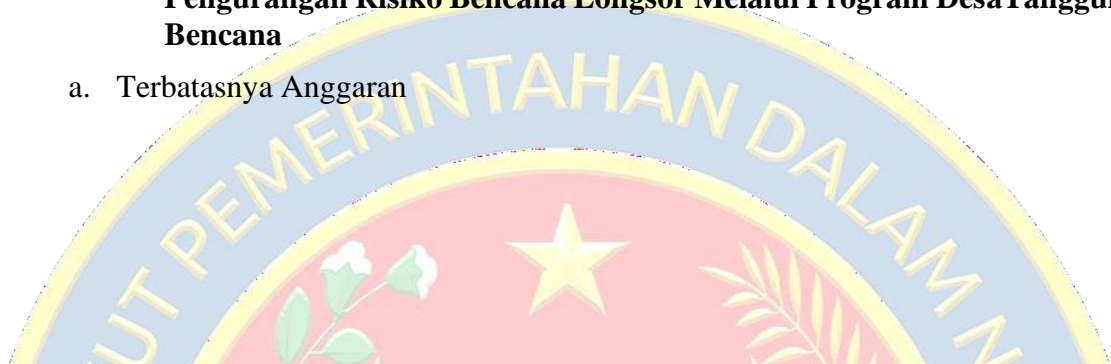
aturan yang ada. Akan tetapi kerentanan di bidang sosial kelembagaan paling terasa di bagian kurangnya jumlah personal dan juga kompetensi pegawai yang kebanyakan bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Untuk di bidang sosial masyarakat dirasa antusias dan rukun dalam menjalankan dan mengikuti program pengurangan risiko bencana dalam hal ini adalah program Desa Tangguh Bencana yang dimotori oleh BPBD. Dalam diri masyarakat dan BPBD motivasi yang terbentuk sudah amatlah besar dikarenakan melihat kondisi wilayah Kabupaten Semarang yang rawan bencana dan masyarakat terpicu untuk menghindari dampak-dampak buruk dari kebencanaan tersebut. BPBD selaku organisasi perangkat daerah di bidang kebencanaan memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana melalui program “Destana” untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap bencana. Juga di satu sisi masyarakat antusias dalam melakukan program tapi ada juga beberapa kelompok masyarakat yang hanya antusias pada saat pelaksanaan lalu memudar setelah kegiatan tersebut berakhir.

c. Peningkatan Kapasitas

Kapasitas merupakan suatu kemampuan daerah serta masyarakat dalam melakukan tindakan dalam pengurangan tingkat kerugian dan tingkat ancaman dari adanya bencana yang berpotensi terjadi (Lassa:2009). Kapasitas juga diartikan sebagai suatu kemampuan diri dalam menghadapi situasi-situasi tertentu yang belum terjadi. Kapasitas diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif dan resiko dari suatu kejadian yang memiliki potensi buruk. Kapasitas dalam hal ini adalah kemampuan daerah dalam melakukan Tindakan dan kemampuan masyarakat dalam melakukan tindakan atas risiko kebencanaan yang ada di sekitar mereka. Tindakan ini merupakan tindakan dalam menuju berkurangnya potensi ancaman yang ada dan menurunnya kerentanan disekitar masyarakat dan juga wilayah tempat tinggal mereka. Juga menurunnya kerentanan yang ada pada diri internal BPBD Kabupaten Semarang. Lalu Bagaimana semangat masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program desa Tangguh bencana dengan tujuan meningkatkan kapasitas diri mereka dalam melakukan mitigasi bencana yang bertujuan untuk menekan dampak dan risiko dari bencana yang akan terjadi. Pelaksanaan dari program desa tangguh bencana ini dilakukan sesuai dengan anggaran dan kapasitas dari BPBD Kabupaten Semarang. Hal ini juga menjadi harapan agar dampak dan risiko dari potensi bencana yang ada dapat menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Juga diharapkan masyarakat lebih paham tentang potensi bencana di daerah mereka. Masyarakat sudah paham akan potensi bencana yang ada di daerah tempat tinggal mereka dan mereka juga sudah melakukan pengurangan risiko bencana secara mandiri. Mereka juga mampu melaksanakan program “Destana” yang disosialisasikan oleh BPBD untuk menambah ilmu dalam hal penanggulangan bencana di daerah tempat tinggal mereka.

3.2 Faktor Penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana Longsor Melalui Program Desa Tangguh Bencana

a. Terbatasnya Anggaran



Anggaran yang diberikan kepada BPBD Kabupaten Semarang dirasa masih sangat kurang untuk pelaksanaan pengurangan risiko bencana melalui program desa tangguh bencana. Dari 235 desa dan kelurahan sampai saat ini baru terbentuk 19 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dimana setiap tahunnya hanya bisa dilaksanakan untuk 3-5 desa atau kelurahan saja. Hal ini dirasa sangat kurang karena untuk memenuhi keseluruhan desa dan kelurahan yang ada akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam hal ini anggaran juga dapat memengaruhi pelaksanaan program-program selanjutnya. Apabila anggaran sudah membengkak di pelaksanaan program pertama maka akan berpotensi membatalkan atau membuat pelaksanaan program yang selanjutnya menjadi tidak optimal. Maka dari itu pemetaan anggaran dilakukan agar mengurangi dampak adanya bencana susulan yang mengharuskan menggunakan anggaran pokok. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, menemukan fakta dilapangan bahwa terdapat beberapa anggaran tambahan juga saat pelaksanaan program desa tangguh bencana, diantaranya digunakan untuk penambahan ATK (alat tulis kantor) yang biasanya terdapat kendala kekurangan ataupun dalam kondisi yang tidak bisa dipakai. Juga untuk dana transportasi tambahan apabila petugas dari pelaksana sosialisasi program memerlukan suatu kebutuhan yang diluar dari perencanaan.

b. Kurangnya Jumlah dan Kompetensi Personil BPBD

BPBD Kabupaten Semarang hanya memiliki 28 personil yang diantaranya adalah 12 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga 16 orang Satgas Kebencanaan. Dari jumlah keseluruhan juga dibagi lagi 4 kelompok piket untuk Satgas, dimana hal ini akan sangat minim personal saat pelaksanaan program desa tangguh bencana dilaksanakan. Yang seharusnya dalam satu waktu bisa dibagi menjadi 2-3 tim pelaksana program hanya bisa menjadi satu tim saja per harinya. Jumlah yang terhitung sedikit untuk pelaksanaan suatu program yang direncanakan menjadi pembuka dari paradigma baru kebencanaan yaitu mengurangi dampak dari bencana atau juga diketahui sebagai mitigasi bencana dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan kurangnya personil seperti ini dapat dilihat bahwa terjadi kekosongan di kantor untuk pelayanan apabila beberapa orang berangkat untuk melaksanakan sosialisasi program desa tangguh bencana. Hal ini dapat mengurangi kinerja didalam kantor dan juga dapat menumpuk pekerjaan yang lain. Ditambah lagi kompetensi yang kurang karena ketidaksesuaian dengan jurusan sekolah atau pendidikan yang ditempuh oleh pegawai sebelum bekerja. Seperti contohnya seperti pada gambar dari bagan struktur organisasi BPBD Kabupaten Semarang bahwa Kepala Seksi di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang beliau adalah seorang lulusan S-1 sarjana sosial.

3.3 Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam Pengurangan Risiko Bencana Longsor Melalui Program Desa Tangguh Bencana

a. Mengusulkan Penambahan Anggaran

Dalam melakukan upaya untuk mengurangi hambatan pada kurangnya anggaran, BPBD Kabupaten Semarang memberikan aspirasinya kepada Bupati dalam hal ini

melalui Sekretaris Daerah selaku ExOfficio Kepala BPBD Kabupaten Semarang guna merancang APBD yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Anggaran dalam hal kebencanaan memang menjadi hal yang sulit dikarenakan bencana merupakan hal yang tidak pasti datangnya, hanya bisa diperkirakan. Namun apabila anggaran yang diberikan sesuai dengan kapasitas maka program-program penanggulangan bencana dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Penambahan anggaran diperlukan untuk menutup kekurangan-kekurangan secara finansial dan juga beralihnya penggunaan anggaran untuk suatu kejadian bencana yang datang secara tiba-tiba dan melebihi perkiraan dalam hal penanganannya, sehingga memerlukan anggaran lebih yang akhirnya diambilkan dari anggaran kegiatan lain yang dirasa dapat dipotong atau digeser pelaksanaannya di lain waktu. Dalam hal anggaran, BPBD tidak bisa memberikan rincian pasti untuk setiap tahunnya karena kejadian bencana yang datang juga tidak dapat dipastikan hanya dapat diprediksi. BPBD hanya mampu menganggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tertentu saja yang dapat dirincikan. Selebihnya seperti terjadinya bencana BPBD hanya mampu memprediksi potensi kerugian dan anggaran yang dibutuhkan.

b. Mengusulkan Penambahan Personil dan Kompetensi ASN BPBD Kabupaten Semarang

Selain mengusulkan tentang penambahan anggaran, BPBD dalam beberapa kesempatan juga mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang untuk menambah formasi perekrutan ASN maupun PPPK guna menambah jumlah personil di BPBD. Selain itu juga merekrut pegawai-pegawai baru dengan kompetensi yang cakap sesuai dengan bidang yang dikerjakan. BPBD dalam hal ini sudah melakukan upaya-upaya dalam mengusulkan penambahan personal baik itu ASN, PPPK, ataupun Satgas Kebencanaan guna menambah jumlah personal dan memperkuat kinerja BPBD dalam melakukan pengurangan risiko bencana melalui program Desa Tangguh Bencana. Penambahan ini tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dari BPBD itu sendiri dalam menghadapi kejadian bencana yang ada di Kabupaten Semarang. Dari data kepegawaian yang telah dicantumkan pada bagian sebelumnya menunjukkan jumlah dari personil BPBD Kabupaten Semarang yang dihitung sedikit dalam menghadapi kejadian bencana dengan luas wilayah Kabupaten Semarang yang cukup luas. 28 orang personil BPBD Kabupaten Semarang dalam menghadapi 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan dirasa sangatlah kurang dan perlu lagi untuk penambahan jumlah personil pada BPBD Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, pengusulan penambahan personil di BPBD Kabupaten Semarang sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas BPBD dalam menghadapi bencana yang terjadi. Usulan-usulan yang dilakukan BPBD Kabupaten Semarang dalam hal ini sudah tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan oleh BPBD untuk keseimbangan pelaksanaan program dan juga pelaksanaan pelayanan di kantor.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam rangka peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Semarang ke arah yang lebih baik dan maju dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka berdasarkan

hasil penelitian, penulis berharap BPBD dapat memperhatikan beberapa hal seperti berikut:

a. Meningkatkan seluruh kompetensi anggota BPBD.

BPBD perlu berkoordinasi dengan BPKPSDM Kabupaten Semarang supaya sumber daya aparatur yang ditempatkan di BPBD memiliki kompetensi mengenai kebencanaan atau paling tidak memiliki latar belakang pendidikan seperti jurusan teknik sipil, geologi, meteorologi dan hidrometeorologi, teknik lingkungan, arsitektur, kesehatan masyarakat, ilmu komunikasi, psikologi, teknik informatika serta yang juga tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Dengan memiliki sumber daya aparatur serta relawan yang berkompeten sesuai kebutuhan kebencanaan, mitigasi bencana terkhusus pada bencana alam kekeringan tidak hanya berfokus tindakan di lapangan, melainkan juga fokus dalam mitigasi dibalik layar seperti pengkajian risiko bencana alam kekeringan melalui pemetaan daerah rawan kekeringan, pemantauan cuaca dan iklim serta memanfaatkan teknologi informasi dengan baik.

b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

Dalam hal ini BPBD perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memantau kualitas sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sistem ini akan membantu BPBD dalam mengevaluasi kinerja dan efektivitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanggulangan bencana sehingga BPBD dapat mengidentifikasi sarana dan prasarana apa yang perlu diperbaharui atau dilakukan pemeliharaan, misalnya pembaruan alat berat eskavator, mesin gergaji besi, dan penambahan transportasi serta pembaharuan gudang yang lebih besar. Selain itu BPBD juga harus memperhatikan dalam hal meningkatkan ketahanan pergerakan tanah dan air melalui memperhatikan kondisi tumbuhan atau vegetasi yang ada disekitaran lereng gunung juga kepadatan penduduk yang bermukim di sekitaran lereng gunung. Jika sarana prasarana yang dimiliki sudah memadai maka diharapkan pelaksanaan pengurangan risiko bencana melalui program desa tangguh bencana diharapkan akan lebih maksimal. Selain itu juga BPBD perlu mengajak masyarakat untuk menghindari mendirikan bangunan di lereng gunung yang curam.

c. Perencanaan anggaran yang tepat

Terkait dengan perencanaan anggaran penulis berharap BPBD mampu untuk menganalisis kebutuhan, menentukan prioritas, membuat rencana cadangan. Juga BPBD diharapkan memiliki rincian anggaran yang dipetakan sebelum mengajukan kebutuhan dana kepada pemerintah daerah, agar penggunaan anggaran memiliki pertanggungjawaban apabila terjadi perubahan dan dapat menjadi evaluasi dan laporan dikemudian hari. Anggaran dalam hal kebencanaan memang menjadi hal yang sulit dikarenakan bencana merupakan hal yang tidak pasti datangnya, hanya bisa diperkirakan. Namun apabila anggaran yang diberikan sesuai dengan kapasitas maka program-program penanggulangan bencana dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Penambahan anggaran diperlukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan secara finansial dan juga beralihnya penggunaan anggaran untuk suatu kejadian bencana yang datang secara tiba-tiba dan melebihi perkiraan dalam hal penanganannya, sehingga memerlukan anggaran lebih yang akhirnya

diambil dari anggaran kegiatan lain yang dirasa dapat dipotong atau digeser pelaksanaannya di lain waktu. Dalam hal anggaran, BPBD tidak bisa memberikan rincian pasti untuk setiap tahunnya karena kejadian bencana yang datang juga tidak dapat dipastikan hanya dapat diprediksi. BPBD hanya mampu menganggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tertentu saja yang dapat dirincikan. Selebihnya seperti terjadinya bencana BPBD hanya mampu memprediksi potensi kerugian dan anggaran yang dibutuhkan

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya berkaitan dengan Pengurangan Risiko Bencana Longsor Melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten, maka dapat diambil kesimpulan seperti berikut: Pengurangan Risiko Bencana Melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Semarang sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang sebagai organisasi terkait dengan sebaik mungkin. Program desa tangguh bencana dilaksanakan rutin setiap tahunnya dalam rangka menambah kapasitas masyarakat dan mengurangi dampak atau risiko dari bencana alam tanah longsor. Dalam pelaksanaannya BPBD menemukan beragam hal yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaannya yaitu, pengurangan ancaman yang didalamnya berisi potensi kerugian dan juga gangguan, penurunan kerentanan yang didalamnya diukur dari kerentanan materi, sosial/kelembagaan, sikap/motivasi, yang terakhir peningkatan kapasitas dilihat dari kemampuan daerah dan masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap potensi bencana yang ada di sekitar mereka. Unsur-unsur tersebut menjadi acuan BPBD dalam melaksanakan program destana dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dari masyarakat. Dalam menjalankan pengurangan risiko bencana melalui program desa tangguh bencana, BPBD Kabupaten Semarang menemui beberapa hambatan yaitu: Terbatasnya Anggaran dan juga kurangnya jumlah personil dan kompetensi pegawai yang ada di BPBD Kabupaten Semarang.

Dari kedua hambatan tersebut muncul dari dalam organisasi BPBD itu sendiri, dimana terbatasnya anggaran dan kurangnya jumlah dan kompetensi pegawai yang merupakan kekurangan yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Semarang itu sendiri. Dua hambatan tersebut ditambah lagi menurut peneliti luas wilayah yang sangat besar menjadikan BPBD sulit dan butuh waktu yang lebih dalam menjangkau daerah-daerah yang jauh dari lokasi kantor BPBD. Lalu juga kondisi tempat tinggal dari masyarakat yang berada di lereng gunung menjadikan risiko dampak terjadi bencana menjadi tinggi. Juga dilihat dari data sarana prasarana yang ada sebenarnya masih dapat ditambah lagi untuk memperkuat kapasitas BPBD dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana melalui program destana.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Semarang yaitu mengusulkan penambahan anggaran dan mengusulkan penambahan personil dan kompetensi ASN BPBD Kabupaten Semarang. Upaya-upaya tersebut dilakukan BPBD demi kelancaran kegiatan pengurangan risiko bencana melalui program desa tangguh bencana yang sampai saat ini masih dinilai kurang optimal karena sulit mencakup banyak tempat dalam kurun waktu satu tahun. Disamping dari upaya yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Semarang dalam mengatasi hambatan dalam

pengurangan risiko bencana melalui program desa tangguh bencana tersebut BPBD Kabupaten Semarang juga terus mengoptimalkan pelaksanaan program desa tangguh bencana yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan tertentu seperti keterbatasan waktu penelitian yang ringkas. Penelitian ini hanya dilaksanakan selama kurun waktu dua minggu, penulis hanya melakukan observasi di Desa Trayu, Kecamatan Sumowono yang saat itu melakukan program desa Tangguh bencana di Kabupaten Semarang. Sehingga data yang didapatkan pun terbatas namun disajikan sesuai dengan fakta yang berada di lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari bahwa topik yang diangkat dan diteliti adalah penelitian baru sehingga penulis menyarankan agar pembaca dapat melakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana longsor melalui program desa tangguh bencana di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah mendapatkan hasil penelitian atau temuan yang lebih baru dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih pertama-tama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan ruang dan kesempatan penulis dalam rangka penelitian ini, dan juga seluruh pihak yang ikut serta membantu menyelesaikan dan menyukseskan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, T. (2011). *Tanah Longsor (Landslide)*.
- Lassa, J. (2009). *Kiat Tepat Mengurangi Risiko Bencana : Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas*. Jakarta: Grasindo.
- Moleong, J. L. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori & Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research and Development*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

SUMBER LAINNYA

Akhirianto, N. A. (2017). Konsep Desain Pengurangan Risiko Bencana Longsor Berbasis Komunitas. *Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana*.

- Nandi. (2007). *Longsor*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rahma, A. (2018). Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Melalui Pendidikan Formal. *Jurnal Varidika*.
- Yunita, R. T. (2021). *Strategi Program Desa Tangguh Bencana Oleh BPBD Dalam Pengembangan Masyarakat di Desa Sukarasa Kecamatan Sigudeg Bogor Jawa Barat, Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

